

KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Oleh : Teuku Syarif Dan RR.Retno Satyastuti

1. Latar Belakang

Era reformasi yang diharapkan menjadi angin segar untuk memberdayakan Koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (KUMKM) ternyata tidak membawa perubahan yang berarti bagi kelompok usaha tersebut. Setelah lebih dari satu dasawarsa reformasi berjalan dan perekonomian nasional berdasarkan berbagai indikator makro ekonomi dinyatakan semakin membaik, kondisi dan eksistensi Koperasi dan UMKM dapat dikatakan stagnan bahkan cenderung menurun. Secara nominal atau pada harga berlaku dari berbagai indikator bisnis kinerja koperasi dan UMKM memang terlihat meningkat, tetapi pada harga tetap atau dinilai dari kualitas usahanya, kondisi kelompok ini ternyata semakin terpuruk. Hal yang demikian antara lain diindikasikan dari semakin kecilnya rata-rata skala usaha dan memburuknya kualitas hidup terutama di kalangan usaha mikro. Rata-rata skala usaha pada harga berlaku meningkat dari Rp 18,79 juta di tahun 2004 menjadi Rp 23,75 juta di tahun 2008. Tetapi pada harga tetap menurun dari 18,79 jt menjadi Rp 17,56 juta. Demikian juga indeks kesejahteraan kalangan ini menurun dari 1,7 pada tahun 1999 menjadi 1,42 di tahun 2008. Disisi yang lain sumbangan Koperasi UMKM terhadap PDRB juga menurun dari 54,89 % pada tahun 1999 menjadi 51,76 % di tahun 2008.

Sejalan dengan keterpurukan UMKM, Kondisi dan eksistensi Koperasi ternyata lebih buruk lagi. Hal ini diindikasikan dari menurunnya peran koperasi di beberapa sektor perekonomian antara lain disektor tanaman pangan. Peran serta koperasi dalam penyediaan sarana produksi menurun dari 73,94 % di tahun 1998 menjadi 4,61 % pada tahun 2008. Demikian juga disektor perkebunan, perikanan dan peternakan peran koperasi dalam penyediaan sarana produksi menurun dari 7,84 % menjadi 3,12.

Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut memang pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM, namun berbagai program dan kebijakan tersebut setelah lebih dari enam puluh tahun belum mampu mengangkat ekstensi dan kesejahteraan Koperasi dan UMKM. Beberapa waktu belakangan ini kondisi koperasi dan UMKM semakin terpuruk. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa program-program yang dilaksanakan belum berhasil membantu Koperasi dan UMKM. Kondisi nyata menunjukkan Koperasi dan UMKM dihadapkan pada berbagai permasalahan baik yang bersumber dari kondisi Internal UMKM maupun dari lingkungannya terutama yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.

2. Perumusan Masalah

Pokok masalah yang akan dicarikan solusinya melalui pengkajian ini adalah “Ketidakmampuan atau ketidakefektifan program-program pemberdayaan koperasi

dan UMKM yang bersumber dari pemerintah, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, maupun Instansi Sektoral Vertikal atau instansi teknis dalam mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dari Daftar Inventarisasi Masalah Koperasi dan UMKM yang disusun oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2009, diketahui banyaknya inkonsistensi program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Inkonsistensi ini terjadi baik dalam program-program bentuk fisik maupun non fisik sehingga tingkat keberhasilannya tidak optimal.

Dalam rangka memberdayakan koperasi dan UMKM serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan, maka masalah masalah tersebut seharusnya segera diselesaikan melalui penyusunan perencanaan program yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi koperasi dan UMKM di lapangan. Mengingat sumberdaya yang dimiliki pemerintah adalah terbatas dan banyaknya masalah yang dihadapi, maka sangat perlu dilakukan kajian / penelitian tentang “Analisa Skala Prioritas Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM”.

3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengukur tingkatan, penyebaran dan dampak masalah yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM
- 2) Menyusun skala prioritas masalah pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk dipecahkan sesuai dengan kepentingan dan dampak dari pemecahan masalah tersebut untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di lapangan

4. Manfaat Penelitian

Mendapatkan skala prioritas masalah yang harus dipecahkan untuk digunakan sebagai masukan dalam penyusunan program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM

5. Metodologi

Kajian ini merupakan penelitian analisis terhadap Daftar Inventarisasi Masalah yang telah disusun oleh Kementerian Koperasi dan UMK tahun 2009 . Penetapan skala prioritas dilakukan dengan : 1) Pengisian daftar pertanyaan terstruktur tentang masalah-masalah yang dihadapi koperasi dan UMKM : 1) Diskusi tentang tingkatan masalah, luas dampak dan keterkendalian masalah dalam forum Focus Group Diskusi (FGD) dan 3) penarikan kesimpulan prioritas masalah dengan menggunakan *Model analisis Skala prioritas. Penilaian terhadap tingkatan dampak dan keterkendalian masalah dilakukan dengan menggunakan metoda Delphi (delphi methode)*. Untuk menilai tingkat kepentingan penyelesaian masalah digunakan teknik skor (skoring). Diskusi dilakukan di tingkat pusat dan di daerah. Lokasi kajian adalah Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Jawa Barat

6. Hasil Pengamatan

6.1. Prioritas Sangat Penting.

1). Idiologis Normatif Koperasi

Dari aspek internal koperasi kelompok masalah Idiologis normatif koperasi menempati urutan pertama sebagai masalah sangat penting yang harus sesegera mungkin diselesaikan. Akar masalah ini menimbulkan dampak luas yang diindikasikan dari banyaknya masalah besar yang ditimbulkan antara lain : (1) Koperasi tidak mempunyai daya tarik sebagai sarana penghimpun ekonomi karena lebih dipromosikan sebagai lembaga yang ideal tidak mencari keuntungan dan berwatak sosial ; (2) Rumusan tujuan fungsi dan peran koperasi terlalu ideal tidak sesuai dengan kapasitas sebenarnya ; (3) Badan usaha koperasi tidak memiliki budaya perusahaan yang kondusif bagi aktualisasi diri ditengah realita perekonomian yang sedang berkembang.

2). Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Masalah kebijakan pembangunan ekonomi sangat penting untuk segera diselesaikan karena secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Beberapa masalah menonjol yang merupakan derivasi dari masalah ini adalah : (1) Banyak kebijakan yang menyebabkan penguasaan sumberdaya potensial oleh koperasi dan UMKM sedikit ; (2) Fenomena dualisme ekonomi yang mengesampingkan peran koperasi dan kelompok Usaha mikro dan kecil. ; (3) Arah kebijakan ekonomi belum mengindikasikan pentingnya peran Koperasi dan UMKM : (4) Kebijakan dibidang ekspor, impor dan distribusi barang mengarah pada monopoli ; (5) kebijakan fiskal yang cenderung meng ikuti keinginan ekonomi pasar (Globa lisasi perekonomian). Mempersulit posi Koperasi dan UMKM

3). Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kelompok masalah ini menempati urutan ke tiga dalam kelompok masalah penting yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya Beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian dalam kelompok masalah ini adalah : (1) Program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM sering dirancang hanya berdasarkan isu dan sinya lemen, tetapi bukan didasarkan pada akar masalahnya ; (2) Sebagian besar program dirancang dalam lingkup makro, tetapi dilaksa nakan dalam lingkup lokal ; (3) Penentuan skala prioritas pelaksanaan program belum didasarkan pada metoda yang valid. : (4) Desain program belum memberikan gambaran yang jelas apa untuk pertumbuhan atau pemerataan. : (5) Program pemberdayaan Koperasi UMKM belum disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan. dan ; (6) Sosialisasi program belum optimal karena sering lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah pusat.

4). Koordinasi Pemberdayaan Koperasidan UMKM

Kelompok masalah ini termasuk dalam kelompok sangat penting untuk segera diselesaikan karena berhubungan langsung dengan optimalitas pemanfaatan sumberdaya pemba ngunan. Adapun masalah-masalah yang termasuk dalam kelompok ini adalah : (1) Pola pembangunan Sektoral tidak selalu matching dengan kepentingan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. : (2) Pelaksanaan program sektoral diori entasikan pada tujuan pembangunan sek toral dan kurang

memperhatikan kepekaan pemberdayaan Koperasi UMKM : (3) Kebijakan sektoral sangat kentara berorientasi ego sektoral, sehingga tolok ukur keberhasilan tidak sesuai dengan kepentingan Koperasi dan UMKM : (4) Koordinasi pemberdayaan KUMKM sulit dibangun, karena hubungan in teraksi antar komponen sistem koordinasi tidak terdefinisi dengan baik : (5) Rendahnya koordinasi pelaksanaan program antar sektor menyebabkan terjadinya tumpang tindih program. ; (6) Sumber dan mekanisme penyaluran bantuan program sangat beragam dan (7) : Antara stake holder tidak ada kesamaan persepsi dalam menafsirkan arti dan fungsi koper

6.2. Kelompok Prioritas Penting

1). Kelembagaan Koperasi

Masalah kelembagaan koperasi termasuk dalam katagori penting untuk segera diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang ada dalam kelompok ini adalah : (1) Gerakan koperasi di Indonesia sangat terfragmentasi sehingga tidak memiliki sinergi untuk bersaing dalam pasar ; (2) Koperasi cenderung berperilaku birokratis akibat adanya penugasan untuk melaksanakan program yang diproteksi pemerintah : (3) Kualitas sumberdaya manusia dilingkungan koperasi baik dari pemahaman perkoperasian maupun bisnis umumnya rendah : (4) Sistem manajemen operasional usaha masih dijalankan secara manual :

2). Kelompok masalah ini termasuk dalam katogori penting untuk diselesaikan karena secara langsung menentukan kemampuan UMKM dalam berusaha dan mengembangkan usahanya. Adapun masalah-masalah yang ada dalam kelompok ini adalah : (1) UMKM tidak siap untuk menanggung resiko kegagalan usaha. sehingga sulit untuk dapat masuk dalam suatu kegiatan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan : (2) Rasa cepat puas akan apa yang telah diperoleh. Menyebabkan UMKM jarang berfikir untuk memperluas usahanya : Rendahnya pengetahuan UMKM dibidang produksi. menyebabkan produk UMKM sulit untuk berkembang

3). Usaha Koperasi

Masalah usaha koperasi penting untuk diselesaikan karena secara langsung berhubungan dengan kinerja koperasi dalam perekonomian masyarakat yang menjadi peran utama koperasi dan daya tarik koperasi. Kelompok masalah ini terdiri dari : (1) Manajemen belum berkembang, menyebabkan koperasi sulit mengoptimalkan pelayanan dan berhubungan dengan pihak lain : (2) Koperasi belum dapat melihat peluang usaha potensial yang tersedia dari lingkungannya : (3) Pemanfaatan SDM dilingkungan oleh koperasi belum optimal : (4) Disorientasi kegiatan usaha dari untuk memenuhi kebutuhan anggota menjadi keperluan pengembangan bisnis : (5) Koperasi sulit untuk menjalin kerja sama baik dengan kalangan Usaha Mikro dan kecil maupun usaha besar : (6) Jaringan koperasi yang berjalan tersegmentasi belum mencapai skala usaha optimal dan rapuh kelangsungannya dari : (7) Lapangan usaha koperasi banyak yang tidak berbasis kepentingan anggota

4). Kondisi / karakter UMKM

Kelompok masalah ini termasuk dalam katagori penting untuk segera diselesaikan secara langsung menggambarkan potensi, kondisi dan eksistensi UMKM dalam perekonomian.. Adapun beberapa masalah yang termasuk dalam kelompok masalah ini dan merupakan masalah pokok yang menyebabkan timbulnya masalah lain adalah : (1) Unit-unit usaha baru lebih banyak tumbuh karena desakan kebutuhan lapangan kerja (2) Produk-produk UMKM tidak berdaya saing karena berada pada sektor yang cepat jenuh dan berkualitas rendah : (3) Nilai tambah dari usaha UMKM rendah karena produknya berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi.

5) Kondisi Usaha UMKM

Kelompok masalah ini termasuk dalam katagori masalah yang penting untuk segera diselesaikan karena secara langsung akan mempengaruhi eksistensi UMKM dalam perekonomian. Beberapa Masalah yang menonjol dari kelompok ini adalah ; (1) Kondisi usaha UMKM lemah dan jaringan pasar UMKM sangat terbatas dan dikuasai oleh sekelompok pengusaha lain yang membangun kartel : (2)UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses bahan baku : (3) Kualitas produk KUMKM relatif rendah karena memakai bahan baku berkualitas rendah dan bahan-bahan berbahaya. : (4) Pendapatan UMKM relatif rendah karena skala usahanya yang kecil serta pasar bahan-baku dan produknya dikuasai pada gang besar : 5) Karena pendapatan yang sedikit, maka UMKM khususnya pengusaha mikro ter masuk dalam kelompok miskin yang tidak memiliki kelebihan uang untuk ditabung : (7) Sebagian besar pengusaha mikro merupakan kelompok marginal dengan pola hidup gali lubang tutup lubang (Survival strategic).

6.3. Masalah Kurang Penting

1.) Produksi dan Teknologi UMKM

Kelompok masalah dengan rata-rata nilai skors skala prioritas sebesar1,86 ini termasuk dalam katagori masalah yang kurang penting tetapi dalam jangka menengah dan jangka panjang perlu diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang termasuk dalam kelompok ini adalah : (1) Teknologi produksi yang digunakan oleh UMKM sangat rendah sehingga kualitas dan produktifitas UMKM rendah : (2) Berbagai sebab mengakibatkan KUMKM sulit untuk melakukan inovasi teknologi : (3) UMKM belum mampu mengaplikasikan berbagai tekonologi tepatguna dari luar negeri. : (4) Hasil inovasi teknologi dari kalangan UMKM belum mendapat perlindungan. : (5) Banyak temuan teknologi dan peralatan dari lembaga-lembaga-lembaga penelitian yang belum dapat dimanfaatkan oleh Kope rasi dan UMKM. : (6) Sertifikasi inovasi teknologi hanya dila kukan terhadap peralatan produksi.

2). Kebijakan Otonomi Daerah

Otonomi daerah masuk dalam kelompok tersendiri karena dari kebijakan ini timbul berbagai masalah tidak saja masalah yang dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah tetapi juga masalah masalah yang penyelesaiannya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Kelompok masalah ini cukup penting dan memiliki nilai rata-rata skala prioritas mencapai 1,98 atau hampir termasuk dalam masalah penting yang harus segera diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang termasuk dalam kelompok ini adalah ; (1) Otonomi daerah berimplikasi pada

keragaman bentuk instansi yang membidangi Koperasi dan UMKM.: (2) Pemerintah Daerah belum memiliki konsepsi yang jelas tentang arah kebijakan, pendekatan dan pola operasional pemberdayaan Koperasi dan UMKM : (3) Sistem organisasi pemerintahan belum memberikan gambaran yang jelas komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program pemberdayaan koperasi dan UMKM : (4) Keterlibatan Pemerintah daerah dalam beberapa kegiatan program masih sangat terbatas : 5) Program bimbingan dan penyuluhan perkoperasian di daerah belum dapat dilaksanakan dengan baik ; 6) Untuk memperbesar PDB dan PAD Pemerintah daerah lebih lebih mengutamakan pengelolaan sumberdaya dilakukan oleh menengah dan usaha besar dan ; (7) Kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi menyebabkan Koperasi dan UMKM tidak terdorong untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru :

3). Program Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM

Kelompok masalah ini memiliki rata-rata nilai skala prioritas yang juga cukup tinggi yaitu mencapai 1,89 atau mendekati kriteria masalah penting yang harus sesegera mungkin diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang termasuk dalam kelompok ini adalah : (1) Sejak era reformasi tidak ada paradigma pemberdayaan KUMKM yang disepakati oleh semua instansi dan kalangan stakeholder : (2) Pemberdayaan koperasi dan UMKM dipersepsikan tidak kontributif terhadap pencapaian target makro ekonomi ; (3) Pemberdayaan koperasi dan UMKM cenderung semakin dijauhkan dari pendekatan ekonomi dan semakin dilekatkan pada pendekatan pengaman sosial : (4) Perumusan visi dan sasaran pembangunan sektoral tidak dikaitkan dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM ; (5) Ada kesan secara sistemik koperasi dikurangi perannya dalam sistem perekonomian nasional : (6) Koperasi tidak lagi dipandang sebagai opsi untuk memenuhi motif ekonomi masyarakat dan : (7) Koperasi hanya dijadikan sebagai alat dalam mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan sektoral, atau peran koperasi hanya sebatas instansi pendukung kegiatan program

7. Kesimpulan

- 1) Akar permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM bersumber dari Kebijakan ekonomi makro yang mensubordinasi kondisi Internal Koperasi dan UMKM.
- 2) Adanya kebijakan perekonomian nasional yang masih belum mampu mensinejikan keinginan potensi untuk memberdayakan UMKM dan koperasi yang diindikasikan dari masih adanya masalah-masalah : (1) Banyak kebijakan yang menyebabkan penguasaan sumberdaya potensial oleh koperasi dan UMKM sedikit ; (2) Fenomena dualisme ekonomi yang mengesampingkan peran koperasi dan kelompok Usaha mikro dan kecil. ; (3) Arah kebijakan ekonomi belum mengindikasikan pentingnya peran Koperasi dan UMKM : (4) Kebijakan di bidang ekspor, impor dan distribusi barang mengarah pada monopoli ; (5) kebijakan fiskal yang cenderung mengikuti keinginan ekonomi pasar (Globalisasi perekonomian). Mempersulit posisi Koperasi dan UMKM
- 3) Kondisi internal UMKM yang ditandai oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan sumberdaya produktif yang sangat rendah serta ; (2)

kebijakan pemerintah yang belum mendukung upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM

- 4) Orientasi pembangunan yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran neoklasik dan era globalisasi menyebabkan ketidakmampuan penyusunan menyebabkan adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan ekonomi yang secara tidak berpihak pada upaya memberdayakan Koperasi dan UMKM
- 5) Iklim usaha yang terbentuk karena orientasi pembangunan yang tidak berpihak kepada koperasi dan UMKM serta keterbatasan SDM UMKM menyebabkan UMKM sulit mengakses sumber-sumberdaya, teknologi dan pasar
- 6) Ada kecenderungan kebijakan dan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian koperasi dan UMKM selama satu dasawarsa terakhir tidak tepat kegunaannya, tidak tepat sasaran dan bahkan banyak menimbulkan permasalahan baru di lapangan.
- 7) Pembinaan UMKM lebih diarahkan pada pengembangan Teknologi produksi dalam rangka meningkatkan daya saing dan kurang memperhatikan kepentingan pengembangan Institusi.
- 8) Koperasi sebagai kelembagaan yang diharapkan dapat mendukung proses pemberdayaan UMKM perannya semakin dikurangi sedangkan disisi yang lain ada skeptisme dari masyarakat terhadap kemampuan koperasi untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan
- 9) Otonomi daerah berimplikasi langsung terhadap kondisi pembinaan koperasi dilapangan yang diindikasikan dari keragaman jenis instansi-instansi yang membidangi koperasi dan UMKM, eselonering jabatan instansi yang bersangkutan serta kompetensi aparat dilingkungan instansi tersebut.

8. Rekomendasi

- 1) Reorientasi pembangunan kebijakan dasar pembangunan yang lebih diarahkan lagi pada kebijakan dan program-program yang berpihak pada upaya memberdayakan Koperasi dan UMKM, khusus untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi internal UMKM dan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.
- 2) Evaluasi kebijakan dan program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang menghambat keberhasilan program-program tersebut di lapangan.
- 3) Reorientasi kebijakan pembinaan agar ada keseimbangan antara pembinaan pada pengembangan Teknologi produksi dalam rangka meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan kepentingan pengembangan Institusi.

- 4) Memperkuat posisi koperasi sebagai kelembagaan pemberdayaan UMKM dengan meningkatkan intensitas pembinaan koperasi, sosialisasi peran dan kedudukan koperasi dalam pembangunan nasional serta menghilangkan skeptisme dari masyarakat terhadap kemampuan koperasi
- 5) Melaksanakan program sosialisasi kepentingan koperasi dalam mendukung pembangunan daerah dan koordinasi program-program pembangunan koperasi dengan pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

1. *Anonymous. 2008 ; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Jakarta.*
2. *Anonymous. 2003 ; Grand Strategi Pengembangan Sentra UKM. Kementerian Koperasi dan UKM RI, Jakarta.*
3. *Anonymous 2003 ; Medium Enterprise Dynamics : The Barriers Constraining on TheDevelopment of Medium-Size Enterprises. Study Report. Supported by The Asia Foundation.*
4. *Anonymous, 2005 : Pedoman Pengembangan Kewirausahaan , Basic Penumbuhan Wirausaha Baru , Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya, Jakarta*
5. *Anonymous, 2006 : Kajian Model Penumbuhan Unit Usaha Baru, Deputi Pengkajian Sumberdaya UKMK, Jakarta*
6. *Anonymous 2006 ; BPS, 2006. Perhitungan Kinerja UMK Ditinjau dari Aspek Kontribusi Terhadap Berbagai Indikator Makro Ekonomi Serta Survei Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) UKM*
7. *Anonymous 2007 ; Deputi Bidang Pembiayaan, 2007. Informasi Tentang Kredit Usaha Mikro dan Kecil dari Dana SUP-005*
8. *Anonymuous 2007 ; Presiden Meresmikan Program Kredit Usaha Rakyat untuk mempercepat Proses Pemberdayaan UMKM. (Harian Republika Tanggal 8 November 2007). Jakarta*
9. *Anonymuous 1995 ; Kongres ICA di Manchester tahun (1995). Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM Jakarta (tidak dipublikasikan)*

10. Agung Nor Fajar, 2007. *Integrasi Program Pembangunan UKM* , Makalah seminar Isue- Isue Strategis Tanggal 20November 2007-11-27
11. Cohen (1990), *Entrepreneurship & Small Business Problem Solving*, 2nd ed., Singapore: John Willey & Son.
12. Dipta, I. Wayan. 2004. *Membangun Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta.
13. Junaidi, A, 2003, *Prospek Rintisan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah*, dalam Infokop nomor 22 tahun XIX *Membangun Sistem Keuangan Koperasi*
14. Manggara Tambunan. 2004. *Melangkah Ke Depan Bersama UKM*. Makalah pada Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention Centre 15-16 september 2004.
15. Muna Nyoman 1987 ; *Penelitian Lembaga Kredit Pedesaan Propinsi Bali dan NTB Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta*.
16. Maskun (1987)., *Kebijakan dan Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia*. Badan Diklat Departemen Dalam Negeri., Jakarta.
17. Nasution Muslimin (1996) : *Mengembangkan Usaha kecil dan Menengah melalui koperasi.*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta
18. Nasution Muslimin (1990); *Ringkasan Disertasi Keragaan Koperasi Unit desa Sebagai Organisasi Ekonomi Pedesaan*. Institut Pertanian Bogor., Bogor
19. Pakpahan Agus ; (1995) ; *Peran Dan Kedudukan Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian Di Indonesia.*, Institut pertanian Bogor. Bogor
20. Soetrisno, Noer. 2005. *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM Dalam Perekonomian Indonesia: Sumbangsih Untuk Analisis Struktural*. STEKPI. Jakarta.
21. Suryadarma Ali 2007. *Kinerja UMKM Masih Lemah* Harian Kompas Tanggal 26 November 2006
22. Syarif. Teuku (2006) : *Kontribusi Kredit Program Pemerintah dalam Mendukung perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM* . Deputi Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM jakarta
23. Siagian Salim (2009) ; *Pembahasan hasil Analisa Daftar Inventarisasi Masalah Koperasi dan UMKM*. Sekertaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM jakarta
24. Suarja Wayan (2009). *Petunjuk Pengisiaan Daftar Inventarisasi Masalah*. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta